

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil  
Negara

AKD: RUU tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  
Aparatur Sipil Negara

Bulan: Januari 2025

Oleh:

GAMBAR

# **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan dan mulai berlaku pada 31 Oktober 2023, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks fungsi legislasi, Komisi II DPR RI mengusulkan perubahan setelah menyoroti adanya kontradiksi yang dihadapi ASN. Salah satu fokus yang dipertimbangkan dalam perubahan UU Nomor 20 Tahun 2023 adalah penempatan pejabat eselon II yang lebih fleksibel, yaitu dengan mengubah status mereka menjadi pegawai pusat yang dapat dipindahkan secara lebih luas, tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu. Perubahan status eselon II yang menjadi pegawai pusat juga memungkinkan adanya rotasi yang lebih adil antar daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi pejabat untuk memperoleh pengalaman yang lebih luas dan memahami tantangan yang dihadapi berbagai daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan baik, tanpa tergantung pada politik lokal yang kadang mengekang potensi kinerja birokrasi. Selain itu, penguatan netralitas ASN dapat mengurangi potensi penggunaan kekuasaan birokrasi oleh pejabat-pejabat yang lebih condong pada kepentingan politik tertentu, yang sering kali mengabaikan tujuan utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan netralitas ASN tidak hanya bergantung pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas individu ASN itu sendiri. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan memperkuat sistem merit dalam pengangkatan dan promosi ASN, yang berbasis pada kompetensi dan bukan pada kedekatan politik.

**Sumber:**

<https://emedia.dpr.go.id/2024/11/19/komisi-ii-dpr-ri-akan-usulkan-revisi-uu-asn/>

<https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6784eddb34777c52943dc142/menguatkan-netralitas-asn-dalam-revisi-uu-no-20-tahun-2023>

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	DPR usulkan revisi UU ASN masuk Prolegnas 2025 demi jaga netralitas	<a href="https://www.antaranews.com/berita/4473849/dpr-usulkan-revisi-uu-asn-masuk-prolegnas-2025-demi-jaga-netralitas">https://www.antaranews.com/berita/4473849/dpr-usulkan-revisi-uu-asn-masuk-prolegnas-2025-demi-jaga-netralitas</a>
Berita	Hindari Duplikasi Tugas Lembaga, Perlu Ada Pemisahan Kewenangan Pengelolaan ASN	<a href="https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&amp;id=21955&amp;menu=2">https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&amp;id=21955&amp;menu=2</a>
Berita	Ketua AAKI Nilai Revisi UU ASN adalah Kebutuhan Mendesak di Era Prabowo	<a href="https://www.tempo.co/politik/ketua-aaki-nilai-revisi-uu-asn-adalah-kebutuhan-mendesak-di-era-prabowo-1194405">https://www.tempo.co/politik/ketua-aaki-nilai-revisi-uu-asn-adalah-kebutuhan-mendesak-di-era-prabowo-1194405</a>
Berita	Komisi II DPR: RUU ASN akan buat rotasi ASN Pemda seperti TNI-Polri	<a href="https://www.antaranews.com/berita/4555714/komisi-ii-dpr-ruu-asn-akan-buat-rotasi-asn-pemda-seperti-tni-polri">https://www.antaranews.com/berita/4555714/komisi-ii-dpr-ruu-asn-akan-buat-rotasi-asn-pemda-seperti-tni-polri</a>
Berita	Komisi II: ASN Eselon II ke Atas Jadi Pegawai Pusat, Bisa Dirotasi Secara Nasional	<a href="https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53479/t/Komisi%20II:%20ASN%20Eselon%20II%20ke%20Atas%20Jadi%20Pegawai%20Pusat,%20Bisa%20Dirotasi%20Secara%20Nasional">https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53479/t/Komisi%20II:%20ASN%20Eselon%20II%20ke%20Atas%20Jadi%20Pegawai%20Pusat,%20Bisa%20Dirotasi%20Secara%20Nasional</a>
Berita	Menguatkan Netralitas ASN dalam Revisi UU No. 20 Tahun 2023	<a href="https://www.netralnews.com/menguatkan-netralitas-asn-dalam-revisi-uu-no-20-tahun-2023/dG9nN25RcXNYV0RFems5bnFuR1h5UT09">https://www.netralnews.com/menguatkan-netralitas-asn-dalam-revisi-uu-no-20-tahun-2023/dG9nN25RcXNYV0RFems5bnFuR1h5UT09</a>
Berita	Revisi UU ASN Ditarget Rampung Tahun 2025, Penerapan Rotasi ASN Eselon II Siap Dilakukan	<a href="https://sokoguru.id/hukum/revisi-uu-asn-ditarget-rampung-tahun-2025-penerapan-rotasi-asn-eselon-ii-siap-dilakukan">https://sokoguru.id/hukum/revisi-uu-asn-ditarget-rampung-tahun-2025-penerapan-rotasi-asn-eselon-ii-siap-dilakukan</a>
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Dpr Dan Presiden (Iii)	<a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11207/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%207%20November%202024.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11207/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%207%20November%202024.pdf</a>
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah Dan Ahli Pemohon (V)	<a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11310/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2013%20Desember%202024.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11310/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2013%20Desember%202024.pdf</a>
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Mendengar Keterangan Presiden Dan Pemberi Keterangan Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah (Iv)	<a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11271/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203%20Desember%202024.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11271/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203%20Desember%202024.pdf</a>
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pemeriksaan Pendahuluan (I)	<a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11075/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2019%20September%202024.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11075/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%2019%20September%202024.pdf</a>
Dokumen	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Perbaiki Permohonan (Ii)	<a href="https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11108/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203%20Oktober%202024.pdf">https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11108/Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20121.PUU-XXII.2024%20tgl.%203%20Oktober%202024.pdf</a>
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023">https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023</a>
Surat kabar	Komisi II Soroti Netralitas ASN	<a href="https://perpustakaan.dpr.go.id/kliping/index/detail/id/46376">https://perpustakaan.dpr.go.id/kliping/index/detail/id/46376</a>